

MANAJEMEN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HIV/AIDS PADA PUSKESMAS

Huriati¹, Serlin Serang², Ramlawati³, Suriyanti⁴, Nur Alam⁵, Nur Hidayah⁶

Email : huriatieti@gmail.com

^{1,2,3,4,5}Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Muslim Indonesia

⁶Departemen Manajemen Keperawatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACT

HIV/AIDS spread is a serious threat to human life. Prevention efforts must be carried out in an integrated, effective, and efficient manner in the management of the health service system, beginning with the puskesmas. However, the literature and research findings on the operational management of HIV/AIDS services, which are primarily in the puskesmas, are still scant. This study utilized a descriptive narrative approach with a literature review. According to the findings of a literature review, the Operational Management System for HIV/AIDS services at the puskesmas is regulated in government policies in the process of controlling HIV/AIDS transmission and is carried out with several processes and stages that are regulated in a system with the goal of improving the quality of services for HIV/AIDS patients. Although there are still some obstacles to the service system's implementation at the puskesmas as a first-rate (Primary) service facility and reduce the rate of HIV/AIDS transmission.

ABSTRAK

Penyebaran HIV/AIDS merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Upaya penanggulangan perlu dilakukan secara terpadu, efektif, dan efisien dalam tatanan manajemen sistem pelayanan kesehatan dimulai dari ujung tombak layanan Kesehatan di Puskesmas. Namun, literatur dan hasil penelitian terkait manajemen operasional pelayanan HIV/AIDS yang ada utamanya di puskesmas masih minim ditemukan, Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran manajemen operasional pelayanan kesehatan HIV/AIDS di puskesmas dalam rangka peningkatan mutu layanan. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif naratif dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka. Berdasarkan hasil kajian literatur didapatkan bahwa Sistem Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS pada puskesmas telah diatur dalam kebijakan pemerintah dalam proses pengendalian penularan HIV/AIDS dan dilakukan dengan beberapa proses dan tahapan yang diatur dalam sebuah system dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien HIV/AIDS di puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama (Primer) dan menurunkan angka penularan HIV/AIDS meskipun masih ada beberapa kendala pelaksanaan dari system pelayanan tersebut.

ARTICLE INFO

Keywords:
HIV/AIDS; Operational Management; Health services; Public health center

DOI:

[10.24252/kesehatan.v14i2.26413](https://doi.org/10.24252/kesehatan.v14i2.26413)

Kata kunci :
HIV/AIDS; Manajemen Operasional; Pelayanan Kesehatan; Puskesmas

Pendahuluan

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan penyakit yang datang. Tertularnya seseorang dengan HIV ini akan menyebabkan orang tersebut menderita *Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)* (1). Data *World Health Organization (WHO)* melaporkan jumlah penderita HIV dari tahun ketahun semakin meningkat, pada tahun 2015 jumlah orang yang terjangkit penyakit HIV mencapai 35,9 juta orang pertahun dengan angka kematian akibat AIDS sebesar 1,1 juta orang. Pada tahun 2016 mencapai 36,7 juta orang pertahun dan angka kematian 1,2 juta orang. Pada tahun 2017 mencapai 36,9 juta orang pertahun dan angka kematian 1,5 juta orang (2).

Data (3), menunjukkan jumlah kasus HIV di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 32.293 orang, peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia diperkirakan akan terus bertambah, 12-19 juta orang rawan untuk terkena HIV dan diperkirakan ada 184.929 penduduk yang tertular HIV (Depkes, 2015). Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dan program penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah telah membuat komitmen serius untuk meningkatkan perawatan, dukungan dan pengobatan dengan upaya pemberdayaan masyarakat



dalam pencegahan HIV/AIDS dilakukan oleh pemerintah melalui konseling, pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan.

Kasus HIV/AIDS yang meningkat mengindikasikan perlu dilakukan suatu upaya penanggulangan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan dan program penanggulangan penyebaran HIV/AIDS. Pemerintah telah membuat komitmen serius untuk meningkatkan perawatan, dukungan dan pengobatan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan HIV/AIDS dilakukan oleh pemerintah melalui konseling, pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan (4).

Pemanfaatan fasilitas kesehatan adalah satu bentuk perilaku seseorang mencari fasilitas kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatannya, kurangnya pemanfaatan fasilitas kesehatan disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain faktor predisposisi diwujudkan dalam stigma, sikap, pengetahuan, kepercayaan, faktor-faktor yang menguatkan ditampakkan dalam ketersediaan fasilitas, infrastruktur, aksesibilitas dan kemudahan mencapai fasilitas kesehatan dalam hal ini jarak, biaya, kesiapan fasilitas transportasi, dan adanya aturan dan komitmen masyarakat untuk mendukung perilaku tersebut, dan memperkuat faktor-faktor seperti sikap dan perilaku keluarga, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat (5).

Puskesmas sebagai ujung tombak kesehatan pemerintah tentunya memiliki beban dan peran yang cukup besar dalam menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Karena itulah pihak puskesmas harus memiliki manajemen pelayanan yang cukup efektif, guna mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mencegah efektivitas program penanggulangan HIV/AIDS di daerah (Ripnowati, 2019). Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang penanggulangan HIV dan AIDS yang isinya memuat tentang upaya dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Penanggulangan adalah segala upaya yang meliputi pelayanan promotif, preventif, diagnosis, kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain serta mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya (6).

Pelayanan HIV/AIDS di puskesmas berdasarkan hasil penelitian (7), menunjukkan secara keseluruhan belum terlaksana pelayanan yang diberikan terhadap penderita HIV dan AIDS masih kurang maksimal, meskipun sudah ada program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS namun persediaan obat-obatan serta sarana dan prasarana fasilitas yang dibutuhkan masyarakat masih belum bisa terpenuhi serta tingginya biaya untuk pengobatan dan adanya ketidakdisiplinan seperti pelayanan yang tidak tepat waktu dari jadwal yang telah ditentukan, serupa dengan penelitian (8), menunjukkan salah satu program pelayanan untuk HIV/AIDS pada remaja pada puskesmas Senapelan belum terlaksana dengan maksimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif naratif dengan pendekatan literature review dimana tahapan penelitian yang dilakukan yaitu dengan membaca, mengkaji dan menganalisis buku literatur ataupun hasil penelitian yang berhubungan dengan topik dan tujuan penelitian. Hasil kajian selanjutnya direvisi dan dinarasikan dalam hasil kajian penelitian. Adapun databased yang digunakan dalam penelusuran literatur yaitu Pubmed, Science Direct dan Google Scholar. Keyword yang digunakan yaitu manajemen operasional, HIV/AIDS, Pelayanan Kesehatan dan Puskesmas.

Hasil Penelitian

Defenisi

a. Manajemen Operasional

Menurut (Wijaya dkk, 2020) Manajemen Operasional ialah suatu bentuk dari pengelolaan yang menyeluruh dan optimal pada sebuah masalah tenaga kerja, barang, mesin, peralatan, bahan, baku, atau produk apapun yang biasa dijadikan sebuah barang atau jasa yang biasa diperjual belikan (Wijaya dkk, 2020). Sedangkan menurut (Chanif, 2016) manajemen operasional terdiri

dari dua kata yaitu manajemen dan operasi, operasi merupakan kegiatan mentransformasikan *input* menjadi *output*, dengan demikian manajemen operasi merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara pengelolaan sumber daya dalam proses transformasi *input* menjadi *output* yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen (9).

Berikut ini adalah definisi manajemen operasional yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang dijelaskan dalam buku Parinduri (2020) (10), antara lain:

- 1) Manajemen operasional ialah sebuah serangkaian kegiatan yang menghasilkan sebuah nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah suatu *input* menjadi *output*.
- 2) Manajemen operasional merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan barang, jasa, atau kombinasinya, melalui proses transformasi dari sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan.
- 3) Manajemen operasional ialah suatu bidang manajemen yang mengkhususkan pada suatu produksi barang, serta menggunakan sebuah alat dan teknik khusus untuk memecahkan masalah produksi.
- 4) Manajemen operasional ialah sebuah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa suatu barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke suatu pelanggan.
- 5) Manajemen operasional ialah suatu penerapan ilmu manajemen untuk mengatur suatu kegiatan produksi atau operasi agar bias dilakukan secara efisien.
- 6) Manajemen operasional atau manajemen produksi adalah manajemen proses konservasi, dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan (*input*) yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan, berupa barang atau jasa/layanan.
- 7) Manajemen operasi adalah perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dari urutan berbagai kegiatan (*set of activities*) untuk membuat barang (produk) yang berasal dari bahan baku dan penolong lain.
- 8) Manajemen operasi dan produksi secara umum dapat diartikan sebagai pengarahan dan pengendalian berbagai kegiatan yang mengolah berbagai jenis sumber daya untuk membuat barang atau jasa tertentu.

Berdasarkan definisi manajemen operasional menurut para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengarahan dan pengendalian serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki untuk merubah *input* menjadi *output* barang dan jasa.

b. Manajemen Operasional Pelayanan Puskesmas

Manajemen Puskesmas adalah suatu rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penilaian dan pertanggungjawaban yang secara sistematis dilaksanakan di Puskesmas dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi sehingga menghasilkan. Manajemen pelayanan Puskesmas, yaitu terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu ditunjang oleh manajemen Pelayanan Puskesmas yang baik (Parinduri, 2020) (10).

c. Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Pelayanan (Service) adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang atau orang lain, terhadap kita yang membentuk suatu keterikatan hak dan kewajiban masing-masing pihak (Abubakar, 2017) (11).

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Acquired Immune Deficiency

Syndrom (AIDS) adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Penderita HIV memerlukan pengobatan dengan Antiretroviral (ARV) untuk menurunkan jumlah virus HIV di dalam tubuh agar tidak masuk ke dalam stadium AIDS, sedangkan penderita AIDS membutuhkan pengobatan ARV untuk mencegah terjadinya infeksi oportunistik dengan berbagai komplikasinya (Kemenkes RI, 2020) (3).

Ruang Lingkup Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Menteri ini meliputi penanggulangan HIV dan AIDS secara komprehensif dan berkesinambungan yang terdiri atas promosi Kesehatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi terhadap individu, keluarga, dan masyarakat (Permenkes RI, 2013) (6)

Fungsi Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Sesuai Permenkes No 75 Tahun 2014 mengatur tentang standar ketenagaan Puskesmas, merupakan organisasi yang memiliki fungsi manajemen, Puskesmas harus dilengkapi dengan tenaga di luar tenaga Kesehatan, seperti tenaga administrasi dan IT. Dari sisi pemenuhan logistic obat dan alat Kesehatan, belum terdapat regulasi yang memperbolehkan Puskesmas untuk membeli obat dan alat kesehatan di luar sistem *e-catalog* (Kemenkes RI, 2014) (12).

Fungsi-fungsi manajemen yang dilakukan di Puskesmas dalam (Ripnowati et al., 2019) (13), sebagai berikut:

a. *Planning* (Perencanaan)

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan dan melakukan penanggulangan HIV/AIDS Puskesmas Tamayang melakukan berbagai macam perencanaan. Diantara perencanaan-perencanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan SDM

Perencanaan SDM adalah perencanaan yang dilakukan dalam rangka menjangkau para tenaga atau sumber daya manusia yang dapat dilibatkan dalam proses pelayanan penanggulangan penyakit HIV/AIDS di puskesmas tamayang, perencanaan SDM ini melibatkan berbagai elemen masyarakat diberbagai sektor, mulai dari perangkat desa, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, unsur pemerintahan dan lain sebagainya.

2) Perencanaan Anggaran Dana

Perencanaan anggaran dana juga telah dilakukan oleh pihak Puskesmas perencanaan tersebut dilakukan oleh Tim Puskesmas, Dokter, Bidang, dan Perawat Anggaran- anggaran tersebut bersumber dari BOK dan JKN. Anggaran dana tersebut dialokasikan untuk realisasi program penanggulangan HIV/AIDS seperti halnya dana transportasi, konsumsi, pengadaan sarana dan prasarana, konsumsi, dan untuk kepentingan laboratorium.

3) Perencanaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana juga merupakan elemen penting yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Tamayang, dalam proses perencanaan sarana dan prasarana, pihak puskesmas berkoordinasi juga dengan para Tim guna mendapatkan fasilitas yang memadai, sehingga realisasi program penanggulangan HIV/AIDS bisa berjalan dengan lancar, diantara rencana sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Puskesmas adalah tentang Lokasi Pemeriksaan, Laboratorium, media penyuluhan, dan Kondom.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Dalam proses manajemen tentu akan melibatkan banyak orang atau banyak pihak dari berbagai lintas sektor, sehingga keberadaan mereka membutuhkan pembagian tugas dan peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang masing-masing elemen yang ada dalam organisasi tersebut. Disinilah fungsi pengorganisasian itu menjadi penting. Puskesmas dalam merealisasikan Penanggulangan HIV/AIDS juga menjalin kerjasama dengan berbagai sektor, dan masing-masing sektor telah memiliki peran dan tugas masing-masing. Diantara tugas dan peran masing-masing sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Tim dari puskesmas, bertugas untuk melakukan penyuluhan, pemeriksaan Kesehatan, pemeriksaan Kesehatan, pemeriksaan laboratorium, pencatatan.
- 2) Kepala Desa, Aparat Desa dan Camat adalah sebagai pendukung dalam kegiatan.
- 3) Babinsa, Babinkamtibnas, dan satpol PP bertugas untuk mendukung dalam menciptakan suasana aman di lokalisasi.
- 4) Para Sasaran atau penderita HIV/AIDS tugasnya adalah wajib datang saat kegiatan.
- 5) Organisasi masyarakat tugasnya adalah ikut membantu dalam kampanye penanggulangan HIV/AIDS saat telah menerima pengetahuan tentang HIV/AIDS.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Bentuk-bentuk dari realisasi program tersebut terdiri dari tiga macam kegiatan pokok yaitu :

- 1) Penyuluhan, hal ini dilakukan melalui berbagai macam forum-forum dengan masyarakat dan melalui media seperti banner, pamflet, baliho, dan lainnya.
- 2) Pemeriksaan hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui masyarakat yang terindikasi terkena penyakit HIV/AIDS, dan dilakukan melalui berbagai kegiatan pelayanan Kesehatan.
- 3) Pendampingan Pemeriksaan, kegiatan ini difokuskan bagi sasaran yang teridentifikasi mengidap penyakit HIV/AIDS resiko tinggi, sehingga penderita mau memeriksakan dirinya mau melakukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan.

d. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan ini menurut Bidan Puskesmas Temayang, dilakukan dalam rangka memastikan proses pencegahan penularan HIV/AIDS. Pengawasan ini dilakukan setiap bulan secara berkala, dan dilakukan dengan cara berkunjung ke desa-desa atau warga sekitar. Disamping itu pengawasan juga dilakukan oleh para elemen masyarakat yang lain terutama kader desa, dan petugas pendamping sasaran resiko tinggi. Sehingga keberadaan penyakit HIV/AIDS serta potensi penyebarannya dapat diketahui dan dikontrol. Secara keseluruhan menurut hemat penulis sendiri, proses manajemen dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS yang dilakukan oleh Puskesmas Temayang sudah berjalan dengan baik dan telah mencakup unsur dan fungsi yang telah dikemukakan oleh para ahli.

Standar Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Kebijakan pengendalian HIV-AIDS mengacu pada kebijakan global Getting To Zeros, yaitu:

- a. Menurunkan hingga meniadakan infeksi baru HIV;
- b. Menurunkan hingga meniadakan kematian yang disebabkan oleh keadaan yang berkaitan dengan AIDS;
- c. Meniadakan diskriminasi terhadap ODHA;

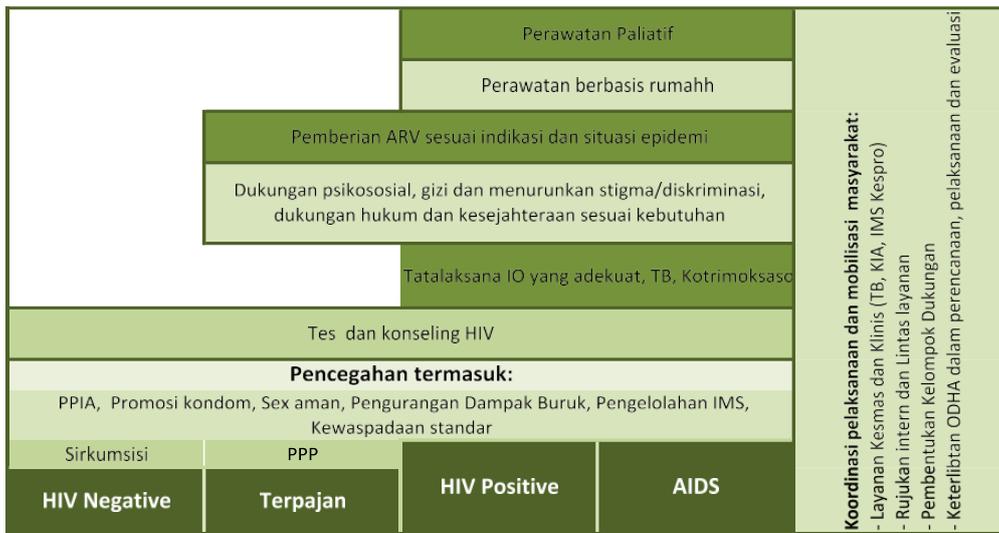
Kebijakan tersebut diatas akan sulit dicapai jika cakupan penemuan kasus dan akses pemberian pengobatan masih rendah. Strategi pemerintah dalam Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas dengan mengacu pada standar (WHO, 2015) adalah: (14)

- a. Meningkatkan penemuan kasus HIV secara dini
- b. Meningkatkan cakupan pemberian dan retensi terapi ARV, serta perawatan kronis
- c. Memperluas akses pemeriksaan CD4 dan viral load (VL) termasuk early infant diagnosis (EID), hingga ke layanan sekunder terdekat untuk meningkatkan jumlah ODHA yang masuk dan tetap dalam perawatan dan pengobatan ARV sesegera mungkin, melalui sistem rujukan pasien ataupun rujukan specimen pemeriksaan
- d. Peningkatan kualitas layanan fasyankes dengan melakukan mentoring klinis yang dilakukan oleh rumah sakit atau FKTP.
- e. Mengadvokasi pemerintah lokal untuk mengurangi beban biaya terkait layanan tes dan pengobatan HIV/AIDS

Penerapan/pelaksanaan Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Seperti diketahui dari (Kemenkes RI, 2015) bahwa infeksi HIV merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan dengan pemberian obat ARV seumur hidup. Oleh karena itu diperlukan layanan yang mudah dijangkau untuk menjaga ketersediaan perawatan dan pengobatan pasien. Layanan ini pada awalnya hanya tersedia di rumah sakit rujukan ARV saja. Ketersediaan layanan perlu diperluas hingga ke tingkat puskesmas atau puskesmas pembantu, bahkan polindes/poskesdes terutama untuk daerah dengan beban HIV yang besar seperti Papua dan Papua Barat serta daerah dengan geografi sulit dan memiliki sumber daya terbatas (daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan/DTPK) (Kemenkes RI, 2015).

Menurut (Kemenkes RI, 2017) Dalam upaya memperluas akses layanan bagi ODHA, Kementerian Kesehatan menerapkan sistem Layanan Komprehensif Berkesinambungan (LKB). LKB merupakan suatu model layanan terpadu yang melibatkan semua unsur layanan baik dari sektor kesehatan primer, sekunder hingga tersier dan layanan dari sektor lain yang terkait dengan kebutuhan ODHA, termasuk keterlibatan dari komunitas. LKB bertujuan untuk mendekatkan dan memperkuat sistem layanan kesehatan hingga menjamin ketersediaan layanan komprehensif dan berkesinambungan. Adapun yang dimaksud dengan layanan komprehensif adalah layanan yang mencakup semua kebutuhan ODHA seperti tergambar pada Bagan 1 di bawah ini. Sedangkan layanan berkesinambungan adalah layanan yang terhubung dari satu titik layanan ke titik layanan lain dengan sistem rujukan yang efektif sepanjang hayat (16).

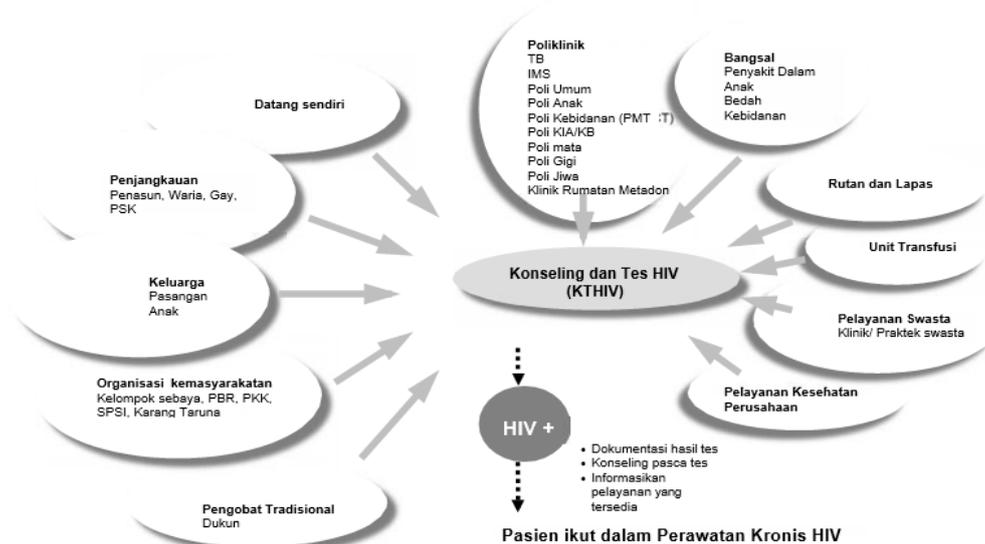


Bagan 1 : Layanan HIV-PIMS Komprehensif Berkesinambungan

Bagan diatas menunjukkan kegiatan dan paket layanan yang perlu dilakukan oleh FASYANKES dan mitranya sesuai dengan status HIV seseorang.

Mengingat infeksi HIV merupakan kondisi kronis dengan di antaranya terjadi kondisi akut maka pelayanannya membutuhkan perawatan akut, kronis dan paliatif yang meliputi fase seseorang belum terpapar hingga masuk fase terminal. Diperlukan paket pengobatan dan perawatan kronis secara komprehensif termasuk pengobatan ARV dan layanan untuk mengurangi penularan HIV, pencegahan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup ODHA (Kemenkes RI, 2017) (16).

Bagan 2: Pintu Masuk Layanan HIV



Bagan diatas menunjukkan tempat penemuan kasus baru HIV dan tindak lanjut yang perlu dilakukan. Penemuan kasus bisa dilakukan difasyankes rawat jalan maupun rawat inap.

Semua ODHA yang memenuhi syarat pengobatan wajib diberi ARV. FKTP perlu mencari cara untuk mendekatkan akses pengobatan bagi pasien yang tidak terjangkau dengan menggunakan sistem jejaring yang tersedia seperti kader, lembaga gereja, pustu, posyandu

dll. Evaluasi jumlah pasien yang terdiagnosis dan mendapatkan ARV perlu dilakukan secara teratur setidaknya tiap 2 minggu untuk menurunkan lolos *follow up* pra ART (Kemenkes RI, 2017) (16).

Evaluasi Manajemen Operasional pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis, untuk keperluan pemangku kepentingan, mengenai suatu kebijakan, program, proyek, upaya atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis yang dibandingkan dengan relevansi, efektifitas biaya dan keberhasilan. Proses evaluasi manajemen operasional pelayanan HIV/AIDS di Puskesmas menurut Kemenkes RI tahun 2015 adalah (Kemenkes RI, 2015) (Kemenkes RI, 2015):

- a) Melakukan pemantauan melalui PWS KIA.
- b) Melakukan penyeliaan fasilitas kepada jaringan dan jejaringnya dengan menggunakan pedoman penyeliaan Fasilitas Kesehatan Ibu dan Anak (PFKIA).
- c) Menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk melakukan asistensi dan fasilitas kepada jaringan PPIA dan FKTP lain di wilayah dan untuk advokasi kepada penentu kebijakan.
- d) Pertemuan secara berkala:
 - a. Puskesmas dan jaringannya tiap bulan;
 - b. Puskesmas dengan lintas sektor tiap triwulan

Untuk membahas capaian hasil kegiatan dibandingkan dengan target yang direncanakan dan Menyusun rencana tindak lanjut dalam mini lokakarya.

Diskusi

Berdasarkan hasil studi literatur dengan menganalisis beberapa hasil penelitian didapatkan bahwa Sistem Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS pada puskesmas telah diatur dalam kebijakan pemerintah dalam proses pengendalian penularan HIV/AIDS dan dilakukan dengan beberapa proses dan tahapan yang dimodifikasi dalam model layanan terpadu yang melibatkan semua unsur layanan baik dari sektor kesehatan primer, sekunder hingga tersier dan layanan dari sektor lain yang terkait dengan kebutuhan ODHA, termasuk keterlibatan dari komunitas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien HIV/AIDS di puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama dan menurunkan angka penularan HIV/AIDS.

Beberapa literatur menjelaskan bahwa pelayanan HIV/AIDS di puskesmas telah memiliki system layanan komperhensif berkesinambungan yang didalamnya melibatkan pihak-pihak terkait serta di puskesmas sendiri telah ditetapkan alur pelayanan khusus pelayanan HIV/AIDS. Selain itu, manajemen operasional pelayanan HIV/AIDS tidak hanya berfokus pada pasien yang telah terinfeksi, namun juga dilakukan screaning secara dini untuk mendeteksi infeksi baru virus HIV/AIDS dan hal tersebut telah diatur dalam kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah penelitian di Zimbabwe yang dilakukan oleh Apollo et al., 2021 (17) yang sejalan dengan penelitian ini bahwa pelayanan pada pasien HIV/AIDS membutuhkan system pelayanan yang berbeda dngan penyakit lain dan harus memiliki system tersendiri. Dalam penelitian ini telah menawarkan sebuah inovasi layanan pengobatan dan perawatan HIV secara gratis pada fasilitas Kesehatan umum, utamanya pada tingkat pelayanan primer (puskesmas) yang telah memiliki SDM dan fasilitas yang lengkap. Pada penelitian ini menyediakan layanan pengobatan dan perawatan HIV dengan menggunakan system pemantauan pasien secara elektronik. System ini dapat menangkap informasi demografis, klinis, dan labolatorium pada pasien.

Pada tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Ford et al., 2018 (18) yang juga sejalan dengan penelitian ini bahwa untuk pelayanan pasien HIV/AIDS harus memiliki pedoman khusus. Pada penelitian ini menyatakan bahwa pelayanan pada pasien HIV/AIDS utamanya yang membutuhkan perawatan lanjutan dengan menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh World

Health Organization (WHO) yang didalamnya terdapat paket pelayanan untuk pasien dewasa, remaja, maupun anak dan juga paket berdasarkan morbiditas maupun mortalitasnya dapat direkomendasikan pada fasilitas Kesehatan berbasis masyarakat. Hal ini dibuktikan pada penelitian ini bahwa banyaknya masyarakat yang kembali untuk mendapatkan pelayanan karena masyarakat merasa dimudahkan dan memilih paket yang diinginkan. Maka dari itu penelitian ini merekomendasikan pedoman yang diterbitkan oleh WHO meskipun seiring berjalannya pelayanan dengan mengacu pada pedoman tersebut ditemukan kendala maka akan dilakukan revisi berdasarkan masukan yang ada.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi literatur dengan menganalisis beberapa hasil penelitian didapatkan bahwa Sistem Manajemen Operasional Pelayanan HIV/AIDS pada puskesmas telah diatur dalam kebijakan pemerintah dalam proses pengendalian penularan HIV/AIDS dan dilakukan dengan beberapa proses dan tahapan yang diatur dalam sebuah system dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien HIV/AIDS di puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama (Primer) dan menurunkan angka penularan HIV/AIDS meskipun masih ada beberapa kendala pelaksanaan dari system pelayanan tersebut.

Daftar Pustaka

1. Kemenkes RI. Profil Kesehatan Indonesia Kemenkes RI. 2015.
2. UNAIDS. United National on AIDS 2017. 2017.
3. Kemenkes RI. Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sifilis dari Ibu ke Anak. Jakarta; 2020.
4. Ripnowati D. Menejemen Pelayanan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Upaya Screening di Puskesmas Temayang Kabupaten Bojonegoro. J Manajerial Bisnis. 2019;Vol. 2 (3).
5. Burhan R. Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan oleh Perempuan Terinfeksi HIV/AIDS. J Kesmas Nas. 2013;8 (1).
6. Permenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV Dan AIDS. Jakarta: Sekretariat Negara; 2013.
7. Nawawi H. Perencanaan SDM Untuk Organisasi Profit Yang Kompetitif. 2017;
8. Asmaiva H. Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja(PKPR) di Puskesmas Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Jom FSIP. 2015;2 (1).
9. Chanif I Al. DEFINISI MANAJEMEN OPERASI. 2016; Available from: <https://docplayer.info/34133637-Definisi-manajemen%02operasi-oleh-ibrahim-al-chanif-s-kom.html>
10. Parinduri L dkk. Manajemen Operasional: Teori dan Strategi. Medan: Yayasan Kita Menulis; 2020.
11. Abubakar R. Manajemen Pemasaran. Bandung: ALFABETA; 2017.
12. Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 2014.
13. Ripnowati D, Kesehatan D, Bojonegoro K, Hartati CS, Putro G, Wijaya U, et al. April-Juli 2019 ISSN 2597-503X MANAJEMEN PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS DALAM UPAYA SCREENING DI PUSKESMAS TEMAYANG KABUPATEN Halaman 230-243. 2019;2(3).
14. WHO. Road Map To reduce HIV-related morbidity and mortality and maximize the prevention benefits of scaling-up access to ARVs, Rapid Scalling-up of HIV Testing and Treatment in High Burden Districts. 2015;
15. Kemenkes RI. Pedoman Manajemen Program Pencegahan Penularan HIV dan Sivilis dari Ibu Ke Anak. Vol. 148. Jakarta; 2015. 148-162 p.
16. Kemenkes RI. Program Pengendalian HIV AIDS dan PIMS Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 2017;1-109.
17. Apollo T, Takarinda KC, Phillips A, Ndhlovu C, Cowan FM. Provision of HIV viral load testing services in Zimbabwe: Secondary data analyses using data from health facilities

- using the electronic Patient Monitoring System. PLoS One [Internet]. 2021;16(1 January):1–18. Available from: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0245720>
18. Ford N, Meintjes G, Calmy A, Bygrave H, Migone C, Vitoria M, et al. Managing Advanced HIV Disease in a Public Health Approach. Clin Infect Dis. 2018;66(Suppl 2):S106–10.